

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN KESADARAN
PENDIDIKAN PADA GENERASI MUDA DI DESA TONGO
KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

JUMADI LAWOTAN
NIM. 218110145

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TAHUN 2022

PERSETUJUAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN KESADARAN
PENDIDIKAN PADA GENERASI MUDA DI DESA TONGO
KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Disusun dan diajukan oleh :

Jumadi Lawotan

Nim. 218110145

PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK

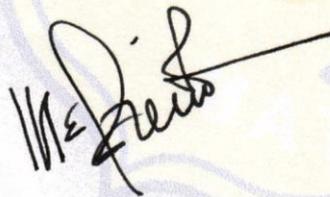
Telah diperiksa dan diajukan untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 09 Februari 2022

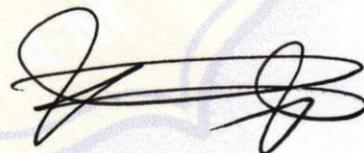
Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Mardiah, S.Sos., M.Si)
NIDN. 0804117201



(Drs. Ramayanto, M.M)
NIDN. 0809096702

Mengetahui

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN KESADARAN
PENDIDIKAN PADA GENERASI MUDA DI DESA TONGO
KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Oleh :

Jumadi Lawotan

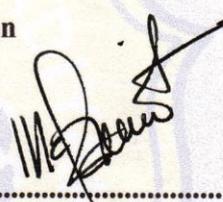
Nim. 218110145

**Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 09 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan**

Tim penguji,

**1. Mardiah, S.Sos., M.Si
NIDN. 0804117201**

Ketua


(.....)

**2. Drs. Ramayanto, M.M
NIDN. 0809096702**

Anggota I


(.....)

**3. M. Aprian Jailani, S.AP.,M.AP
NIDN. 0804049501**

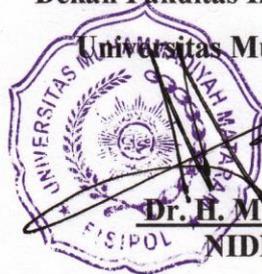
Anggota II


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : Jumadi Lawotan

NIM : 218110145

Alamat : Btn Taman Nirwana Blok B/3, Kec Sekarbela, Mataram NTB

1. Memang benar skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Pada Generasi Muda Di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat” adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya termaksud meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Jumadi Lawotan
NIM: 218110145



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumadi Lawotan
NIM : 218110145
Tempat/Tgl Lahir : Kintabaru, 11-03-1999
Program Studi : Administrasi Publis
Fakultas : Fisiologi
No. Hp : Jumadiawdang@gmail.com
Email : 085339927368

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pengaruh Pemanfaatan Desa dalam Membangun Kesetaraan Pendidikan Pada Generasi Muda Di Desa Tongo Kecamatan Sekeloa Kabupaten Sumbawa Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022

Penulis



Jumadi Lawotan
NIM. 218110145

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumadi Lawotan
NIM : 218110145
Tempat/Tgl Lahir : Kinabalu, 11-03-1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : JumadiLawotan9@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan pada Generasi Muda Di Desa Tongo Kecamatan Sekeloa Kabupaten Sumbawa Barat.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15-Maret.....2022
Penulis



Jumadi Lawotan
NIM. 218110145

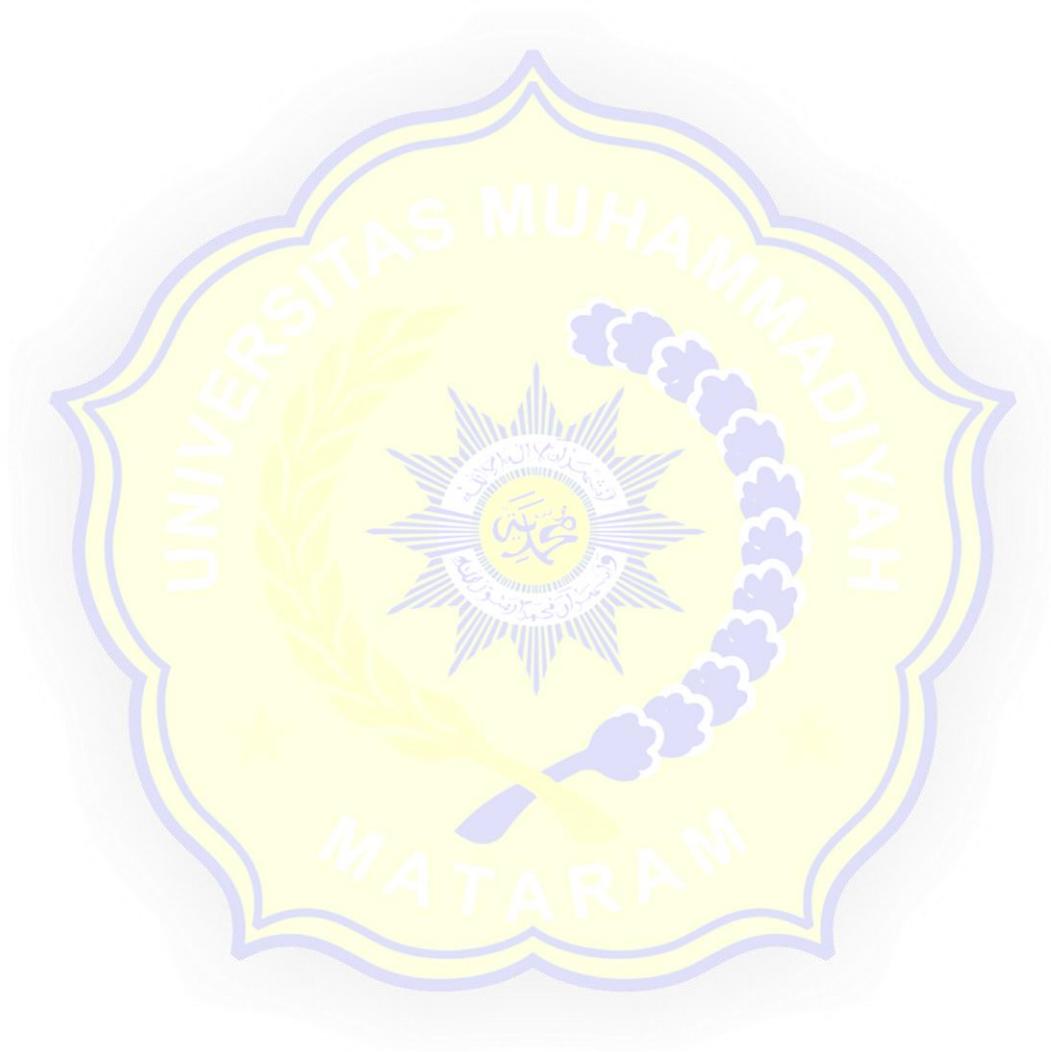
Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“BERLAYAR ITU PROSES”



LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Almarhum bapak Ibrahim wahid dan ibunda tersayang Bahria H. Hamid yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terhebat selama peneliti menjalankan proses akademik sampai pada penyusunan Skripsi ini.
2. Abangku terkasih lukman Ibrahim,S. AP yang saling melengkapi, memahami serta bahu membahu dalam suka maupun duka untuk pencarian jati diri ditanah perantauan (Kota seribu masjid)
3. Abang Ali Hamid dan kakak Aprilia yang selalu memberikan motivasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materil dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Skripsi ini.
4. Keluarga besar Lamaholot yang terhimpun dalam organisasi paguyuban HIMLA-Lombok yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seseorang yang juga ikut membantu secara teknis dalam penyusunan skripsi ini (Syuryani Syamsul)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniah NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Pada Generasi Muda Di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahiliah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampung itu tugas akhir ini (Skripsi). Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan tugas akhir (skripsi) ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap. Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Muhammadiyah Mataram.
4. IbuMardiah, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pemulis penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ramayanto, S.Sos, M.M. selaku dosen pembimbing skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama

menyusun skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini

6. Seluruh dosen dan staf Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuanganku Amfiacurniawan, M. Heru, Abdul Muhaimin, M. Arif Hidayat, , Orce Kabunggul Dll, calon ma'mum dunia dan akhiratku yang tidak henti hidup dalam pikiran sehingga memotivasi untuk seantiasa meraih mimpi dan citacita kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya atas bantuannya baik berupa materi maupun pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi masih ada kekurangan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulir berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak -pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 15 November 2021

Penulis

Jumadi Lawotan

NIM. 218110145

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN KESADARAN
PENDIDIKAN PADA GENERASI MUDA DI DESA TONGO KECAMATAN
SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

JumadiLawotan¹, Mardiah², Ramayanto³
Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing³

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Dalam meningkatkan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah Desa berdasarkan undang nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya tanpa adanya diskriminasi. Diantara persoalan yang dihadapi generasi muda Desa Tongo kecamatan sekongang kabupaten Sumbawa Barat saat ini masi banyak generasi muda yang putus sekolah serta pesimis untuk melanjutkan pendidikan. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan generasi muda Desa Tongo putus sekolah serta pesimis dalam melanjutkan pendidikan yaitu lingkungan Desa Tongo yang sangat dekat dengan PT Amman Mineral, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor kebijakan pemerintah desa yang kurang maksimalterkaitpendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduktif dengan metode Kualitatif Deskriptif. Tipe atau metode dalam penelitian ini bagaimana mendeskriptifkan atau memberikan gambaran bagaimana pemerintah Desa Tongo menerapkan kebijakan pemerintah Desa di bidang pendidikan dan mengetahui faktor apa yang menghambat generasi muda Desa Tongo untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Keberhasilan Kebijakan atau regulasi yang di bangun Pemerintah desa dalam membangun kesadaran pendidikan pada generasi muda di Desa Tongo. Ditentukan oleh beberapa aspek yakni peran merupakan aspek dinamis yang terus menerus berubah yang mempengaruhi kedudukan (status) dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya. Dari hasil penelitian diketahui Peran Pemerintah Desa dalam membangun kesadaran Pendidikan pada generasi muda di Desa Tongo dan Faktor apa yang menghambat generasi muda di Desa Tongo dalam melanjutkan jenjang Pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Pemerintah, Pendidikan, Generasi Muda.

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN BUILDING
EDUCATION AWARENESS IN THE YOUTH GENERATION IN TONGO
VILLAGE, SEKONGKANG DISTRICT, WEST SUMBAWA REGENCY**

**JumadiLawotan¹, Mardiah², Ramayanto³
Student¹, First Consultant², Second Consultant³**

**Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

To improve education sector policies, the Village government must follow the duties and functions outlined in law number 20 of 2003, which states that the National Education System in article 11 paragraph 1 requires the government and local governments to provide services and facilities and to ensure the implementation of quality education for all citizens without discrimination. Many young people have dropped out of school. They are pessimistic about continuing their education among the issues the young generation faces in Tongo Village, Sekongang sub-district, West Sumbawa Regency. Several factors contribute to Tongo Village's younger generation dropping out of school and being pessimistic about continuing their education, including the village's proximity to PT Amman Mineral, family factors, economic factors, and village government policy factors that are less than ideal in terms of education. This study took a logical approach with a descriptive qualitative method. This study aims to describe or provide an overview of how the Tongo Village government implements village government policy in education and determine what circumstances prevent Tongo Village's youthful generation from pursuing higher education. The success of the village government's programs or rules in raising education awareness among the younger generation in Tongo Village. Several factors influence the role, which is a dynamic component that changes over time, impacting the position (status) and carrying out its rights and obligations by its position. The importance of the village government in raising education awareness among Tongo Village's younger generation is known from the research findings, as are the variables that prevent Tongo Village's young people from continuing their education at the higher education level.

Keywords: Government, Education, Young Generation.

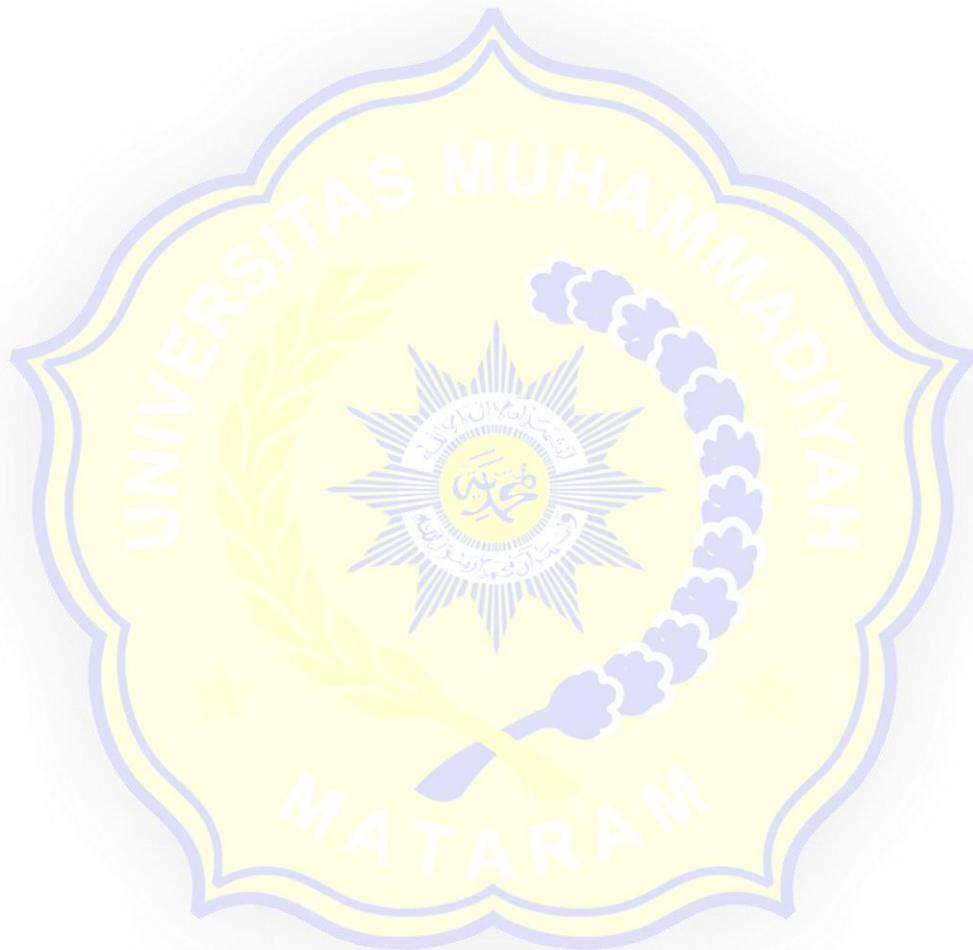


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERESTUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Teori.....	16
2.2.1 Konsep Peran	16
2.2.2 Aspek-Aspek Peran.....	18
2.2.3 Bentuk-Bentuk Peran	20
2.2.4 Kewajiban Dalam Peran	21
2.3 Pemerintah Desa.....	22
2.3.1 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa	24
2.3.2 Tugas Dan Fungsi Sekertaris Desa	26
2.3.3 Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan	27

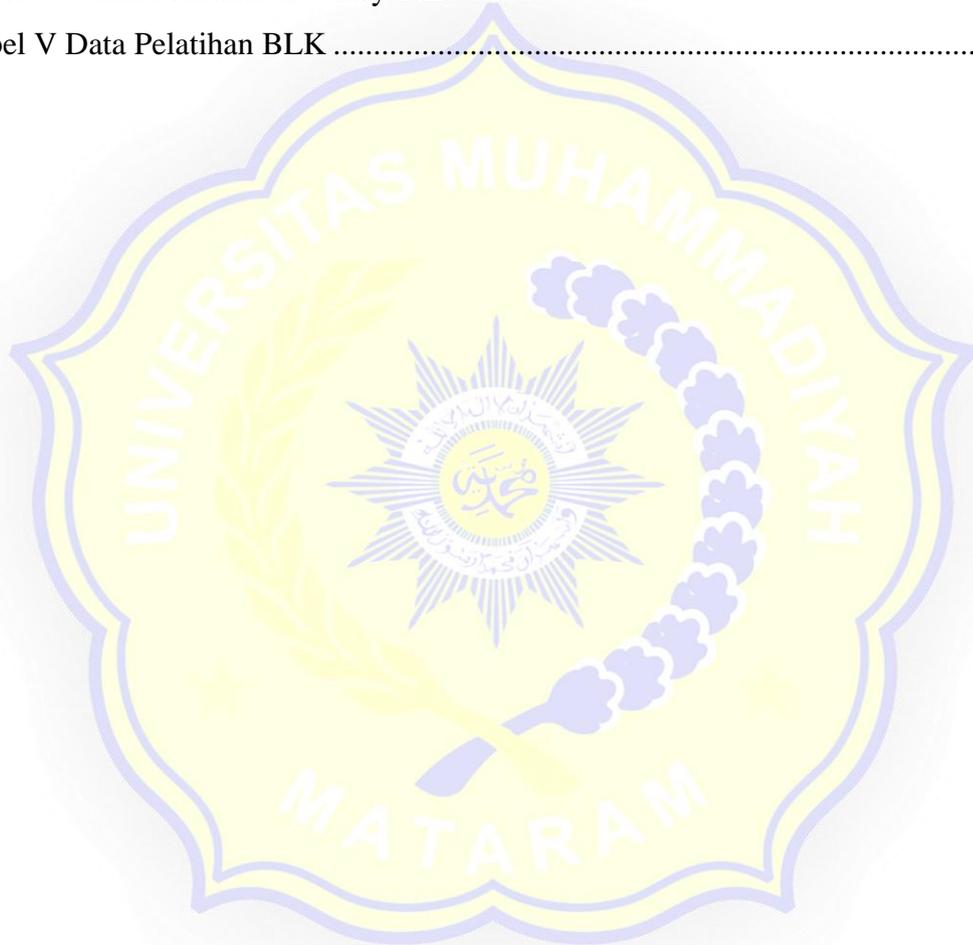
2.3.4 tugas dan fungsi kepala seksi	28
2.3.5 tugas dan fungsi kepala wilayah	28
2.4 Kesadaran	29
2.5 Pendidikan.....	31
2.5.1 Tujuan Pendidikan	32
2.5.2 Fungsi Pendidikan.....	34
2.6 Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3 Sumber Data.....	38
3.3.1 Data Primer	38
3.3.2 Data Sekunder.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4.1 Observasi.....	39
3.4.2 Wawancara.....	40
3.4.3 Dokumentasi	40
3.5 Informan Penelitian.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Lokasi Desa Tongo	44
4.1.2 Kondisi Demografi Desa Tongo	45
4.1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tongo	46
4.1.4 Prasarana Dan Sarana Pendidikan.....	47
4.1.5 Mata Pencaharian Desa Tongo	48
4.1.6 Visi Misi Desa Tongo	49
4.1.7 Keadaan Penduduk Desa Tongo	50
4.1.8 Struktur Organisasi Desa Tongo.....	51
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.2.1 Peran Pemerintah Desa	52
4.2.2 faktor penghambat generasi muda melanjutkan pendidikan.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79



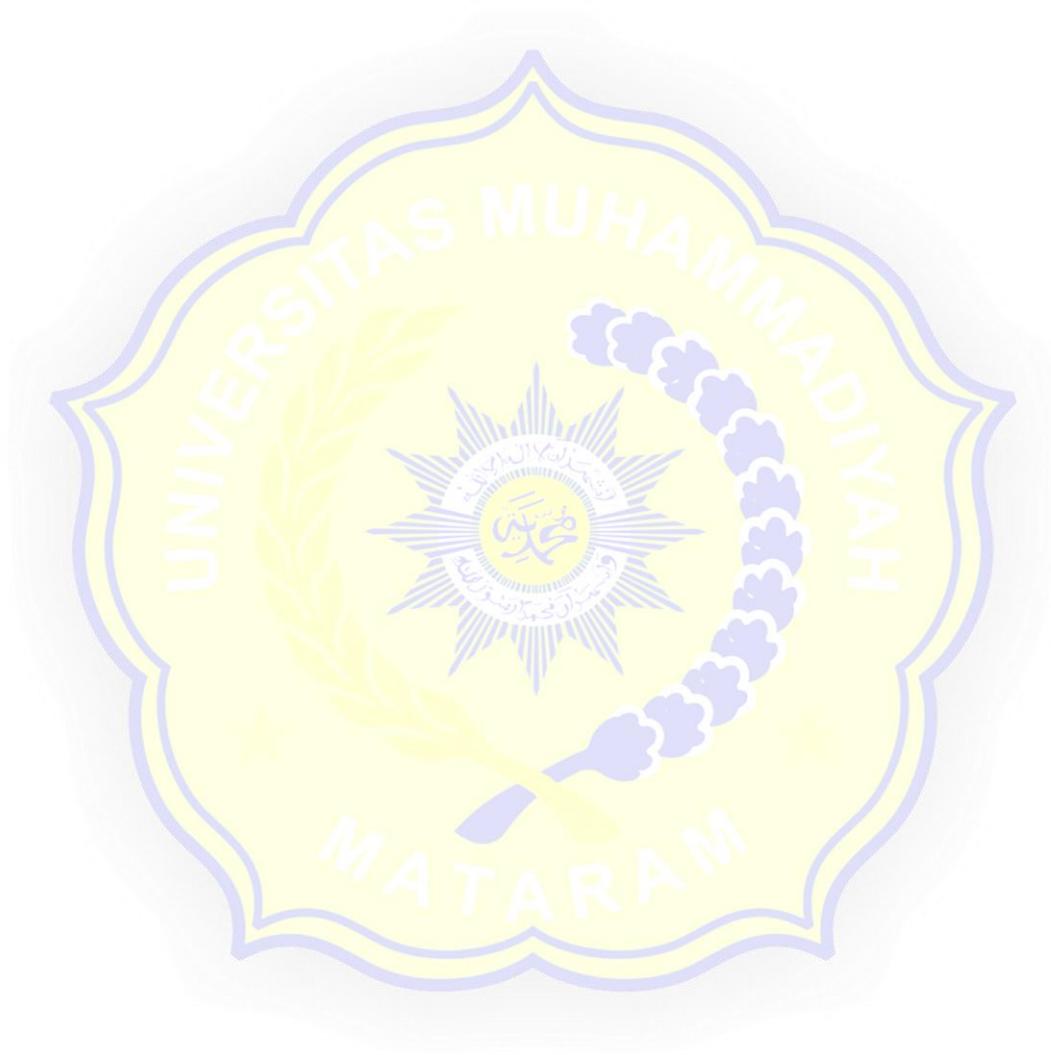
DAFTAR TABEL

Tabel I Data Penduduk Desa Tongo	45
Tabel II Tingkat Pendidikan Desa Tongo	48
Tabel III Prasarana Dan Sarana Pendidikan.....	49
Tabel IV Mata Pencaharian Masyarakat	50
Tabel V Data Pelatihan BLK	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar I Peta Lokasi Desa Tongo	44
Gambar II Struktur Organisasi Pemerintah Desa	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara luas yang tidak hanya berpusat pada ibu kotanya saja, tetapi juga memiliki pergerakan dan pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan pencapaian cita-cita negara yang berlangsung di tingkat desa. Karena 70% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, maka daerah pedesaan menjadi titik fokus pembangunan. Lebih lanjut, keberadaan desa merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan, pemberdayaan, dan pemberdayaan baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat berkorelasi dengan kemajuan suatu negara. Lorosa dalam Zulhaqiqi ,(2020: 26)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbatas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara (NKRI). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melakukan upaya melalui penerapan kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Anwas (2013:4) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah Proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk meningkatkan situasi dan kondisi mereka sendiri

disebut sebagai pembangunan akar rumput. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan individu menjadi lebih kuat. Setiap orang dalam masyarakat dalam suatu masyarakat sesungguhnya memiliki potensi, gagasan, dan kemampuan untuk memperbaiki diri dan keadaan masyarakatnya, tetapi potensi tersebut tidak selalu terwujud karena berbagai sebab. Sangat penting untuk mendorong atau menginisiasi ide-ide untuk membangkitkan kembali peran dan posisinya dalam rangka membangun masyarakat yang sukses untuk mengaktifkan kembali kemandirian masyarakat dalam pengembangan komunitasnya.

Dengan demikian, Desa merupakan suatu daerah yang sangat membutuhkan pembangunan dan pembangunan, terutama dari segi landasan ekonominya. Pembangunan ini merupakan upaya untuk mengurangi berbagai disparitas dalam hal pendapatan, kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin, serta kesenjangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, antara lain. Selain itu, pembangunan pedesaan didefinisikan sebagai program pembangunan yang dilakukan secara terencana atau yang meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti meningkatkan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pembangunan pedesaan juga diartikan sebagai program pembangunan yang dilakukan secara terencana atau yang meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. (Rani, 2018 : 15-16).

Pengembangan dan perubahan karakter siswa menjadi perhatian penting dalam pendidikan, dan juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan,

sikap dan keyakinan kepada generasi muda serta transmisi keterampilan dan aspek lainnya kepada generasi muda dalam pendidikan. Mendidik orang adalah proses menginstruksikan dan belajar tentang pola perilaku manusia yang konsisten dengan apa yang diharapkan masyarakat dari mereka. Meskipun pendidikan tidak diragukan lagi merupakan faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup kaum muda, jelas bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan seluruh masyarakat. Bangsa yang sejahtera dengan kepribadian yang luhur, terlebih lagi di era dimana manusia semakin memprediksikan bahwa mereka akan lebih kompetitif di era globalisasi dan di masa depan, adalah kombinasi yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia harus mengembangkan keterampilan atau kompetensi dalam dirinya agar dapat berkembang menjadi manusia yang berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi negara dan negaranya. (S.Nasution, 2004:10)

Hak atas pendidikan merupakan komponen fundamental dari hak asasi manusia. Berbagai aspek hak atas pendidikan ada, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik, yang semuanya termasuk dalam kategori ini. Kesempatan pendidikan sangat penting untuk realisasi hak asasi manusia lainnya dan oleh karena itu dilindungi sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Menyelenggarakan pendidikan sampai tamat merupakan syarat untuk memperoleh hak atas pekerjaan, dengan anggapan bahwa dengan pendidikan yang tinggi akan mudah mencari pekerjaan. Bahkan pendidikan sering dikaitkan dengan kepedulian terhadap hak-hak perempuan, dan pendidikan secara luas dianggap sangat vital bagi pemberdayaan perempuan.

Perwujudan hak dasar atas pendidikan dalam konteks negara digolongkan sebagai hak positif menurut hukum hak asasi manusia internasional dari sudut hukum hak asasi manusia internasional. Implikasinya, jika pemerintah tidak melakukan intervensi, hak-hak tersebut tidak akan sepenuhnya terwujud sebagaimana mestinya. Akibatnya, pemerintah desa wajib melaksanakan permintaan tersebut. Ciri pembeda lainnya dari hak ini adalah tidak dapat dikurangi. Dalam arti bahwa negara bertanggung jawab untuk pemenuhan yang lengkap.

Mengingat pendidikan telah menjadi kebutuhan atau hak dasar setiap warga negara, maka pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, sebagaimana dituangkan dalam UU No. dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Akibatnya, orang kaya dan miskin pun memiliki hak untuk mengenyam pendidikan.

Artinya pendidikan adalah. pendidikan, memungkinkan mereka untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sejalan dengan visi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa: Sistem pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi. manajemen pendidikan, guna menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga pendidikan harus diselenggarakan secara terencana dan sistematis.

Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang semakin menunjukkan komitmen pemerintah terhadap populasi pemuda. Tujuan utama UU tersebut adalah untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dengan pemerintah bertindak sebagai katalis..

Fakta bahwa karakteristik generasi muda yang menonjol adalah mereka yang energik, aktif, kreatif, dan inovatif menjadi salah satu alasan keberhasilan mereka. Sejak dahulu kala, pemuda telah menunjukkan potensi luar biasa di berbagai bidang. Diantaranya memiliki keberanian fisik yang kuat, memiliki jaringan komunikasi dan jaringan yang luas, memiliki pemikiran yang tidak tercemar (idealis), memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, memiliki rasa ketekunan yang tak tergoyahkan, dan memiliki jiwa kepeloporan, yang kesemuanya telah berkontribusi dalam pemuda menjadi garda terdepan perubahan di nusantara ini. Di sisi lain, pemuda Indonesia terus dihadapkan pada berbagai persoalan yang menantang. Beberapa dari mereka masih buta huruf, dan akibatnya tingkat pendidikan mereka sangat rendah.

Banyak elemen yang mempengaruhi keberhasilan inisiatif pendidikan di dunia nyata. Ini termasuk aspek-aspek seperti keterlibatan orang tua, keterlibatan pemerintah, dan faktor sosial. Kelangsungan proses pendidikan suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh masyarakat di mana ia berada. Sekolah yang mampu bertahan dan berkembang menunjukkan bahwa masyarakat sekitar peduli dan sadar akan nilai pendidikan; Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap pendidikan berdampak pada kelangsungan

hidup suatu proses pendidikan dalam jangka panjang.

Saat ini, pemerintah telah menerapkan wajib belajar untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di kalangan anak muda. Namun upaya tersebut dinilai tidak efektif sama sekali karena ada faktor lain yang mempengaruhi anak atau remaja untuk memilih tidak melanjutkan pendidikan, seperti keinginan untuk bekerja atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan remaja. Masalah seperti ini sering kita jumpai di desa-desa atau desa-desa terpencil, di mana mayoritas pemuda lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan melihat permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan pemuda di desa lebih memilih untuk bekerja tidak lain adalah keyakinan bahwa mereka tetap dapat bekerja walaupun tidak memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tentu saja, jika kita mempertimbangkan persamaan sisi pendidikan, yang berkaitan dengan konteks generasi atau pewaris bangsa, ini menjadi masalah yang sangat serius. Berkonsentrasi pada generasi penerus, khususnya di desa, kita masih menemukan banyak remaja yang tidak melanjutkan pendidikan, dan alasan ini tidak jauh dari persepsi populer tentang pendidikan, yang akan berdampak sangat negatif bagi masa depan bangsa. Desa.

Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan pada umumnya masih rendah, dan sebagian besar pendidikan masyarakat Desa Tongo hanya sebatas jenjang SLTP dan SLTA, dengan sedikit kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar jenjang tersebut. Selain itu, karena akses pendidikan tinggi

di luar tingkat SMA terbatas, pengetahuan mereka tentang pendidikan juga dapat dikatakan terbatas, karena generasi muda Desa Tongo kurang menyadari pentingnya pendidikan formal. Namun, mereka ragu untuk menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang perguruan tinggi, karena orientasi mereka lebih kepada pekerjaan daripada pendidikan, dan karena masyarakat beranggapan mengapa mereka menyekolahkan putra-putrinya ke perguruan tinggi padahal mereka telah difasilitasi. Untuk masuk kerja atau bekerja di perusahaan pertambangan PT AMAN MINERALS terlihat adanya kesenjangan antara tingkat kesadaran dengan tingkat pendidikan di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat..

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan Kabupaten yang sudah lama tidak berdiri, menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa untuk selalu dapat berperan aktif dalam berbagai pembangunan yang ada, khususnya pembangunan bidang pendidikan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Generasi muda merupakan pilar yang sangat penting dalam suatu fungsi pemerintahan Negara, hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata “mengesampingkan” realitas situasi generasi muda di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kemampuan untuk mengembangkan dan memperhatikan sektor pemuda semakin memburuk. Pemberdayaan pemuda itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 Ayat 6 adalah kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, dan Pasal 13 menurut Pemerintah Melaksanakan Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. peran pemuda. Masalah utama yang diidentifikasi dalam

penelitian ini adalah kegagalan pemerintah untuk berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan generasi muda di desa Tongo, terbukti dengan terjadinya kejadian yang diuraikan di atas.

Atas dasar masalah pokok diatas, rumusan masalah penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: **Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Pada Generasi Muda Di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam membangun kesadaran Pendidikan pada generasi muda di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2) Faktor apa yang menghambat generasi muda di Desa Tongo dalam melanjutkan jenjang Pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan adalah tujuan yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat berhasil. Berikut ini adalah tujuan, yang didasarkan pada definisi masalah yang dikemukakan oleh peneliti di atas::

- 1) Menentukan peran yang dimainkan oleh pemerintah desa Desa Tongo dalam meningkatkan kesadaran tentang pendidikan di kalangan generasi muda di desa.
- 2) Untuk mengetahui keadaan apa yang membuat generasi muda di Desa Tongo tidak dapat menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka dilakukan investigasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini akan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dan perluasan pengalaman penelitian di bidang peran pemerintah dalam pendidikan untuk generasi muda, khususnya.

2) Manfaat Praktis

Manfaat pada tataran praktis Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun mahasiswa karena dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pembaca sebagai hasil temuannya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel I. *Penelitian Terdahulu*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Delyasbah Rudin, 2019	Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Bidang Pendidikan.	Bentuk kerjasama antara pihak swasta dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur Di bidang Pendidikan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam ketentuan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga (Swasta), dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar Negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik

			<p>serta saling menguntungkan.</p> <p>Akibat hukum adanya pelanggaran kerjasama dalam pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, adalah adanya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut membawa konsekuensi dipenuhinya prestasi sesuai dalam perjanjian atau perjanjian berakhir. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukannya hak dan kewajiban yang seimbang dalam perjanjian kerjasama ini, sehingga akan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah, termasuk membawa keuntungan bagi pihak swasta maupun bagi pemerintah daerah, adanya pelibatan sector swasta dalam pembangunan daerah merupakan upaya untuk menumbuhkan sector swasta agar bisa lebih berkembang dan percepatan pembangunan daerah sehingga berkembang dan percepatan pembangunan daerah sehingga berkembang dengan baik.</p>
2	i Rahman Farida, 2020	ran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Remaja Putus Sekolah Di Kec. Ile Ape, Kab. Lembata Nusa Tenggara Timur	<p>bagai aksi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap setiap hak setiap masyarakat khususnya menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di kab.</p>

			<p>Lembata nusa tenggara timur tentunya membutuhkan peranan pemerintah daerah kab. Lembata nusa tenggara timur. Pemerintah memuaskan kepentingan dan keinginan rakyat. Pemerintah kota setempat akan memberikan kontribusi dalam pengurangan putus sekolah dengan menyelesaikan wajib belajar 12 tahun sebagai cara untuk memastikan hak asasi penduduk sesuai dengan visi dan tujuan reformasi sistemik melalui bantuan keuangan, beasiswa universitas untuk penduduk kurang mampu melalui program bsm, dan lingkungan diluar jangkauan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap anak putus sekolah adalah kondisi obyektif (gambaran umum) untuk studi putus sekolah di kab. Lembata pada 2019. Studi ini melibatkan 715 anak, yang kemudian dibagi ke dalam banyak jenjang pendidikan sekolah. Di tingkat sekolah dasar, 390 anak putus sekolah, sedangkan 150 anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Menurut temuan penulis, alasan yang menyebabkan anak putus</p>
--	--	--	--

			sekolah termasuk kurangnya partisipasi di sekolah, keadaan keluarga yang tidak sesuai, ekonomi keluarga yang buruk..
3	ri Haryanti 2021	ran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam	<p>1. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara.</p> <p><i>Pertama</i>, Antara lain kepada para orang tua yang tidak berniat menyekolahkan anaknya maka pemerintah memberikan masukan, memberikan bimbingan dan arahan agar orang tua anak mau menyekolahkan anaknya kembali, demi untuk program wajib 9 tahun.</p> <p><i>Kedua</i>, Kepada warga yang tidak memiliki penghasilan yang cukup maka anak-anaknya diberikan bantuan perlengkapan sekolah seperti: seragam sekolah lengkap, peralatan sekolah lengkap diantaranya: tas, sepatu, buku pelajaran.</p> <p><i>Ketiga</i>, Kepada warga yang jarak tempuh ke sekolah cukup jauh, maka di kirimkan guru kontrak yang berada di daerah desa-desa pelosok yang</p>

			<p>cukup sulit akses kendaraan masuk, itu dinamakan program guru garis depan.</p> <p><i>Keempat</i>, Secara berkala selalu ada cross check ke lapangan dari dinas sosial, program yang terbaru yang cukup lengkap mendata dari segi sosial keluarga, segi pendidikan keluarga, dan sebagainya, jadi pemerintah dapat secara lengkap mendata penduduknya masing-masing. Dengan adanya program ini dengan tujuan untuk selalu mendata kependudukan, dari segi masukan, kendala yang dihadapi di lapangan 81 82 82 yang bertujuan untuk mengetahui keresahan masyarakat, terkhusus masalah pendidikan keluarga, dan sebagainya, jadi pemerintah dapat secara lengkap mendata penduduknya masing-masing.</p> <p>Dengan adanya program ini dengan tujuan untuk selalu mendata kependudukan, dari segi masukan, kendala yang dihadapi di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui</p>
--	--	---	---

			<p>keresahan masyarakat, terkhusus masalah pendidikan.</p> <p>2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin</p> <p>am sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia diharapkan memberikan pandangan bahkan solusi yang tidak hanya pada tahap wacana namun juga praksis.. Berarti pemerintah “wajib” (jika tidak maka berdosa) menyelenggarakan pendidikan yang semurah mungkin dan sebaik mungkin untuk rakyatnya.</p>
--	--	--	--

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Peran

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peran adalah sebagaiberikut: Penting untuk diingat bahwa peran adalah komponen dinamis dari posisi (status). Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya, mereka memenuhi perannya..

Soerjono Soekanto, di sisi lain, memiliki perspektif yang berbeda tentang fungsi tersebut. “Peran adalah ciri dinamis jabatan,” jelasnya (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan bertindak dalam suatu peran. (Soekanto, 2002:243).

Istilah "peran" mengacu pada perilaku atau tindakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah kumpulan tingkah laku yang diharapkan dapat diperlihatkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai anggota masyarakat. Soekanto (2014) mendefinisikan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan (Soekanto, 2014: 219). Sementara itu, signifikansi peran yang disebutkan dalam Status, Jabatan, dan Peran dalam Masyarakat dapat dijelaskan dengan berbagai cara, yang pertama melalui analisis sejarah. Sejarah mengatakan bahwa konsep peran awalnya diperoleh dari mereka yang memiliki ikatan kuat dengan teater atau teater yang berkembang di Yunani Kuno atau Roma, menurut catatan sejarah. Secara khusus, peran mengacu pada karakter yang dibawa atau disandang oleh seorang aktor di atas panggung sehubungan dengan

lakon tertentu. Kedua, menurut ilmu sosial, konsep peran adalah sebagai berikut: (Soekanto, 2014: 212). Merupakan seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau organisasi agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan apa yang diharapkan dari mereka oleh masyarakat. Setiap orang memainkan berbagai peran yang ditentukan oleh pola kehidupan sosial. Implikasinya adalah bahwa peran menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan kemungkinan apa yang diberikan komunitas kepadanya.

Peran juga dapat didefinisikan sebagai tuntutan yang diamanatkan secara struktural yang dipenuhi (norma, harapan, tanggung jawab, dan lain-lain). Ini memiliki serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan penyelia dengan seluruh organisasi dan membantunya melakukan tugas organisasinya. Peran adalah kumpulan tindakan yang terjadi di antara sekelompok orang, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan tugas yang berbeda.

Dikutip oleh Soerjono Soekanto dari buku "*Role, Personality and Social Structure*" karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut:

1. Peran ditentukan oleh norma-norma sosial yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat. Makna ini berperan sebagai seperangkat aturan yang memandu seseorang melalui interaksi sosial.
2. Peranan adalah konsepsi tentang apa yang dapat dilakukan

individu dalam komunitas tertentu secara keseluruhan.

3. Perilaku individu yang vital bagi struktur sosial suatu masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai peran dalam beberapa kasus.

2.2.2 Aspek-Aspek Peran

Peranan merupakan Kontribusi seseorang dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau mengukur hubungan antara dua (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat dievaluasi..

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2002: 243), peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran mencakup konvensi sosial yang dikaitkan dengan status atau tempat sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran adalah sistem aturan yang membimbing seseorang melalui situasi sosial.
2. Peranan adalah konsepsi tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam komunitas tertentu secara keseluruhan.
3. Perilaku individu memainkan fungsi penting dalam struktur sosial masyarakat, dan peran ini dapat digambarkan seperti itu.

Mencermati uraian di atas, jelaslah bahwa setiap individu atau kelompok dalam hal ini dinas perhubungan menjalankan peran sesuai dengan norma yang terkait dengan kedudukan sosialnya, artinya menjalankan peran sesuai dengan peraturan yang berlaku. memandu layanan transportasi selama proses pengembangan masyarakat. Dalam hal ini penulis mengacu pada norma-norma hukum, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, serta norma-norma sosial, yang jika dipenuhi oleh jasa transportasi, menghasilkan hubungan yang menghasilkan nilai-nilai pelayanan antara jasa transportasi dengan pelanggannya, yang disebut dengan lingkaran sosial. diikuti oleh apa yang dapat dilakukan oleh agen transportasi di masyarakat dan juga perilaku layanan transportasi, yang sangat penting bagi struktur sosial suatu masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto (2002:243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan

oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi yang terlalu banyak

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Peran

Biddle dan Thomas Dalam Soekanto (2002: 244), membagi istilah dalam teori peran maka ada empat golongan Yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. kaitan antara orang dan perilaku

Peneliti dapat memberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada teori peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan. Didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam ranah sosial tentunya mendukung keberadaannya.

2.2.4 Kewajiban Dalam Peran

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Eko, 2014:16).

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada Desa dalam pemerintahan Desa yaitu.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal bersekala Desa
3. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya difikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan didalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

2.3 Pemerintah Desa

Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. (Sarundajang, 2002:5).

Pemerintah adalah bagian alat kelengkapan Negara dapat di artikan secara luas dan dalam arti seni. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yuridis atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara (Manan,2001:101).

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subag Hukum BPK, (2015:12) Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan

penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam pasal 1 angka 1

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset, oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, diregulasi dan penataan Desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta peraturan perundangan menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni kewenangan Desa. Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki Desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kewenangan desa meliputi;

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Masyarakat Desa

4. Pemberdayaan Desa

Menurut Subag Hukum BPK (2015:15), perbedaan definisi Desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai Desa ini tidak berbeda, kesemua definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan Desa diantaranya;

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
2. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
3. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Desa perlu melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di Desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan Desa. Dimana pembangunan Desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2.3.1 Tugas Dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang

memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;

- a. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- b. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- c. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- d. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2.3.3 Tugas dan fungsi kepala urusan,

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2.3.4 Tugas dan fungsi kepala seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan Peraturan Desa, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
- c. pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- d. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2.3.5 Tugas dan fungsi kepala kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.4 Kesadaran

Secara etimologis, kesadaran berarti (1) keinsyafan, keadaan mengerti, seperti kesadaran akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil; (2) hal yang dirasakan atau dialami seseorang, seperti kesadaran diri, keadaan seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Secara terminologis, kesadaran dapat diartikan sebagai timbulnya sikap, mengetahui, memahami, menginsafi, dan menundak lanjuti suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini masih general karena kesadaran belum difokuskan pada bidang tertentu. Ketika kesadaran tersebut difokuskan pada bidang tertentu, pengertiannya dapat dispesifikasi, seperti kesadaran pendidikan yang obyeknya sangat berbeda dengan misalnya kesadaran hukum. Kesadaran

pendidikan merupakan kehadiran sikap mengetahui, memahami, menginsafi, dan menindak lanjuti proses pembimbingan untuk mengembangkan potensi kemampuan seseorang menjadi sumber daya yang kuat. Adapun kesadaran pendidikan didapatkan dalam beberapa macam:

1) Dari segi alur tahap pelaksanaan pendidikan, didapatkan beberapa kesadaran:

a. Kesadaran Perencanaan.

Para pelaku pendidikan baik secara individu maupun secara institusional harus memiliki kesadaran perencanaan agar mereka dapat memproyeksikan dan memetakan aktifitas-aktifitas pendidikan kedepan dengan jelas, rinci, teratur, tersistem dan terukur. Selain itu juga dapat mematok target-target yang akan dicapai kedepan secara proporsional dan rasional diukur dari kondisi yang ada sekarang.

b. Kesadaran Proses.

Semua pelaku pendidikan harus menyadari bahwa aktifitas pendidikan dan hasil-hasilnya dapat diwujudkan melalui suatu proses. Penanaman nilai pendidikan itu ada pada proses tersebut. Dengan memiliki keasdraran proses seseorang akan menempuh pendidikan mesti rela dan sabar menunggu proses berlangsung.

c. Kesadaran Moral.

Kesadaran ini dibutuhkan karena moral yang baik dapat menghiasi kepribadian seseorang dengan tindakan-tindakan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Moralitas bukan hanya melengkapi

keimanan, ketakwaan dan intelektualitas seseorang, melainkan justru berpadu dengan tiga komponen tersebut. Jadi moralitas menempati posisi yang penting dalam proses pendidikan dan menjaga hasil-hasilnya.

2.5 Pendidikan

Mudyahardjo (dalam Triwiyanto, 2014:22), memberikan pengertian pendidikan ke dalam tiga jangkauan, yaitu pengertian pendidikan maha luas, sempit dan luas terbatas. Definisi maha luas yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi yang memengaruhi pertumbuhan individu. Definisi sempit, yaitu pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang di upayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.

Definisi luas terbatas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan

luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peran hidup secara tepat (Triwiyanto, 2014:23).

Menurut Saidah (2016:210) tingkat pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam menjalankan pengalaman belajar untuk mempersiapkan individu agar dapat memainkan perannya didalam masyarakat yang dilaksanakan secara berjenjang dalam pendidikan formal seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Menurut Andriyus (2013:26) tingkat pendidikan merupakan salah satu penentu partisipasi politik individu atau kelompok dalam sistem pemilu. Kemudian hal tersebut sejalan dengan pendapat Nofitra (2016:3) yang menjelaskan pendidikan yang tinggi sangat berpengaruh dalam memberikan informasi-informasi tentang politik, serta bisa mengembangkan sebuah kecakapan dalam menganalisa dan menciptakan minat serta kemampuan berpolitik.

2.5.1 Tujuan Pendidikan

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (dalam Danim 2013:41), Bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara akademik, pendidikan memiliki beberapa

tujuan. *Pertama*, mengoptimasi potensi kognitif, efektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh individu. *Kedua*, mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi untuk menghindari sebisa mungkin individu tercabut dari akar budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi situasi masa depan yang terus berubah, baik intensitas maupun persyaratan yang diperlukan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa, berupa kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dengan spirit atau keyakinan untuk memilih dan menegakkannya. *Kelima*, mendorong dan membantu individu mengembangkan sikap bertanggungjawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, serta memberikan kontribusi dalam aneka bentuk secara seluasnya kepada masyarakat. *Keenam*, mendorong dan membantu individu memahami hubungan yang seimbang antara Hukum, Kebebasan Pribadi dan Sosial.

Ketujuh, mendorong dan mengembangkan rasa harga diri, kemandirian hidup, kejujuran dalam berkerja, dan integritas. *Kedelapan*, mendorong dan mengembangkan kemampuan individu untuk melanjutkan studi, termasuk merangsang minat gemar belajar demi pengembangan pribadi. *Kesembilan*, mendorong dan mengembangkan dimensi fisik, mental, dan disiplin bagi individu untuk menghadapi dinamika kerja yang serba menuntut persyaratan

fisik dan ketepatan waktu. *Kesepuluh*, mengembangkan proses berpikir secara teratur pada diri individu. *Kesebelas*, mengembangkan kapasitas diri sebagai makhluk Tuhan yang akan menjadi pengemban amanah dimuka bumi ini (Danim 2013:41-42).

Menurut Abu Ahmad (1976:3), mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa dan Negara, maka hampir seluruh Negara di Dunia ini mempunyai dasar dan tujuan pendidikan. Demikian pula masing-masing orang mempunyai dasar dan tujuan pendidikan, yaitu melihat kepada cita-cita, kebutuhan, dan keinginannya, semuanya tergantung pada keinginan tiap-tiap orang untuk mengarahkan dirinya agar tercapai apa yang dihajatkannya itu, karena tanpa pendidikan orang tidak akan dapat menentukan ke mana tujuan hidupnya.

Lebih dari itu, bahwa pendidikan akan selalu berkaitan dengan pola tingkah laku kehidupan bermasyarakat, karena orang yang bergaul dimasyarakat selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga proses pendidikan dan pengaruhnya akan nampak pada perkembangan individu dan masyarakat.

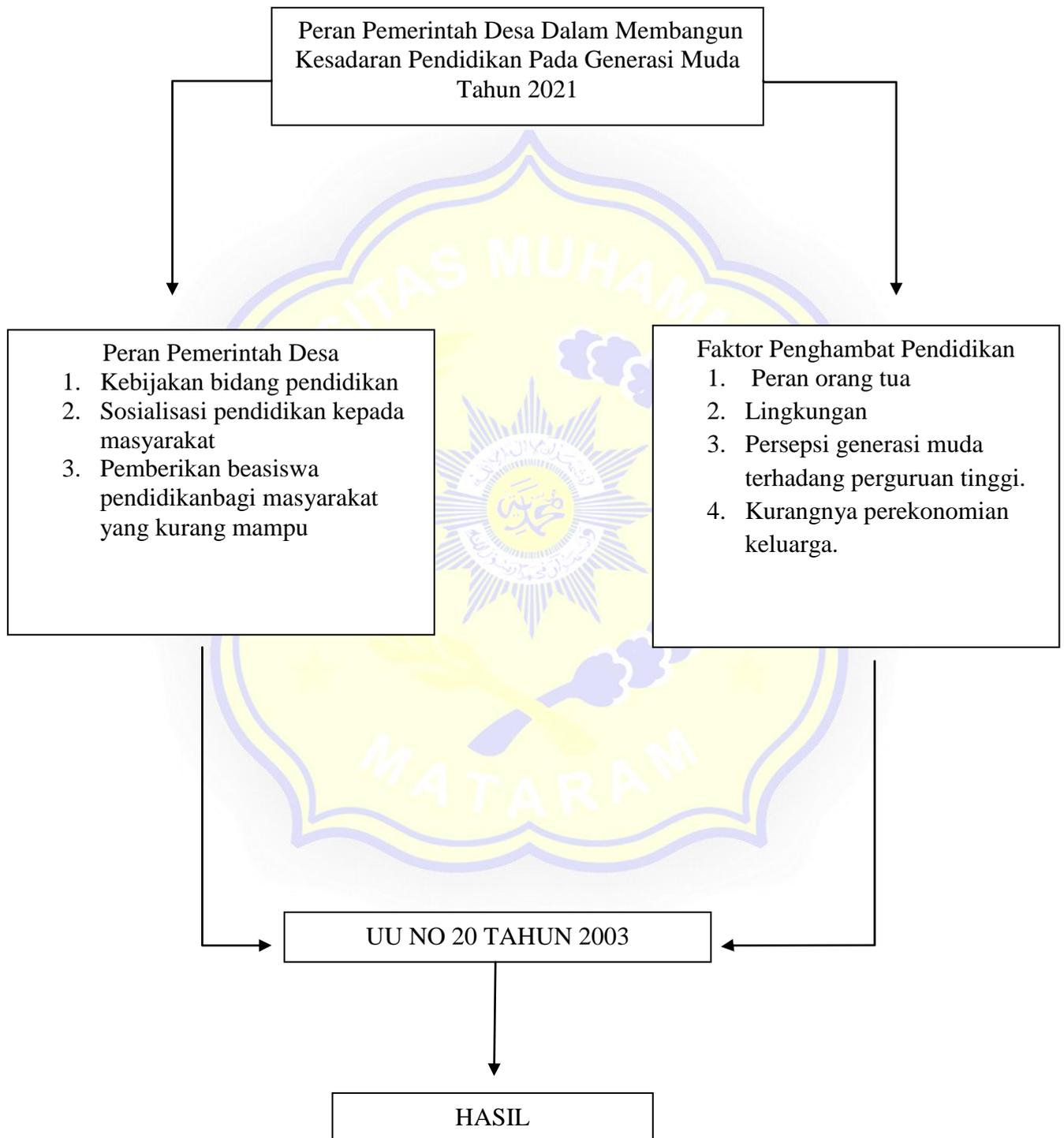
2.5.2 Fungsi Pendidikan

Suardi (2010:7) Menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah menghilangkan penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Diasumsikan bahwa orang yang berpendidikan akan terhindari dari kebodohan, karena dengan modal ilmu pengetahuan

dan keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan, orang akan mampu mengatasi berbagai problema kehidupan yang dihadapinya.

Menurut Abu Ahmad (1996:190), mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa dan Negara, maka hampir seluruh Negara di Dunia ini mempunyai dasar dan tujuan pendidikan. Demikian pula masing-masing orang mempunyai dasar dan tujuan pendidikan, yaitu melihat kepada cita-cita, kebutuhan, dan keinginannya, semuanya tergantung pada keinginan tiap-tiap orang untuk mengarahkan dirinya agar tercapai apa yang di hajatkannya itu, karena tanpa pendidikan orang tidak akan dapat menentukan ke mana tujuan hidupnya. Lebih dari itu, bahwa pendidikan akan selalu berkaitan dengan pola tingkah laku kehidupan bermasyarakat, karena orang yang bergaul di masyarakat selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga proses pendidikan dan pengaruhnya akan nampak pada perkembangan individu dan masyarakat.

2.6 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penelitian ilmiah”(Abdurrahman, 2011:96). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu “hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”(Sutrisno, 1995:3). Sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas. Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan hanya berupa angka-angka hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang : Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Pada Generasi Muda Di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data sekunder dan data primer di lapangan. Sumber data primer adalah “data yang diperoleh dan

digali langsung dari sumber pertama atau subyek penelitian (Suraya, 2013:20). Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan, maka peneliti lebih menekankan pada hal yang terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Pada Generasi Muda.

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Tongo, Kec. Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai Peran Pemerintah Desa. Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Pada Generasi Muda. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 Bulan, yaitu mulai pada Tanggal November 2021 sampai Januari 2022.

3.2. Sumber Data

Sumber Data yang disajikan dalam peneliti yaitu dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.3.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau wawancara hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan informan yang didapat dari Pemerintah Desa terkait pendidikan pada generasi muda.

3.3.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan (M. Burhan Bungin, 2013:129). yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek penelitian dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pada observasi ini, peneliti Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi” yang telah disusun sebelumnya.

3.4.2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai (Muhammad, 2008:151).

Menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Sumber data primer Guna memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara terarah, yaitu “wawancara dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan “cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian” (Lexy J Moleong, 2004:248). Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti Melalui Pemerintah Desa ini adalah dokumen langsung yang berhubungan dengan penelitian, visi dan misi Pemerintah Desa, kemudian bagaimana Pemerintah Desamenjalankan perannya.

3.3. Informan Penelitian

Penulis menganalisis dan mengumpulkan data dari informan-Informan dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memberikan rincian ringkas yang relevan dengan tujuan dan masalah studi. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu;

1. Kepala Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Staf Bidang Pendidikan Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Tokoh Masyarakat Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Para Generasi Muda Desa Tongo yang tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan (Lexy J Moleong, 2004:248).

Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Pada Generasi Muda Di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mencakup hasil wawancara yang meliputi : reduksi data,, Dari hasil analisis data yang kemudian dapat Menarik Kesimpulan dan verifikasi. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti;

1. Reduksi

Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Menarik Kesimpulan dan verifikasi

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. dimana peneliti mencari arti benda-benda, mencatat peraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana.

